Laporan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

A. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan I	Capaian TW I (%)
I	***Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi*** Indikator 1.1 Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia	Persentase	85%	20%	10,57%	12,43%
	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I - EU CEPA)	Persentase	100%	20%	20%	20%
	Indikator 1.3 Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat	Persentase	100%	62,5%	62,5%	62,5%
II	***Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas*** Indikator 2.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia	Persentase	85%	20%	11%	13%

III	***Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berkualitas*** Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	**25%**	**25%**
IV	***Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Profesional*** Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Persentase	92%	20%	20%	21,7%

Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	**Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia
2. Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I - EU CEPA)
3. Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia	**<u>LATAR BELAKANG</u>** IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi bilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong realisasi peningkatan volume perdagangan dan investasi. Efektivitas kerja sama ekonomi bilateral ini diukur berdasarkan tiga komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut: **1. Jumlah Penyelesaian Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia (80%)** Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi bilateral. Cakupan kesepakatan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, komitmen di bidang perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya yang relevan dengan kepentingan nasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi bilateral, diplomasi ekonomi, business matching, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini dibobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi bilateral merupakan tugas dan fungsi pokok dari Asdep KSE Bilateral. Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2026 sebesar **20 Komitmen,** yaitu: a. **8 Komitmen kerja sama ekonomi yang terselesaikan** 1. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Inggris; 2. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Korea Selatan; 3. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-RRT; 4. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Australia;

5. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Amerika Serikat:
6. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-EAEU;
7. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Kanada;
8. Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Jepang;

b. **10 Komitmen pada forum yang terlaksana**
1. Komitmen pada forum WGTII RI-Rusia;
2. Komitmen pada forum SKB RI-Rusia;
3. Komitmen pada forum Board Meeting Prospera Phase II;
4. Komitmen pada forum the 13th SOM 6 WG RI-Singapura;
5. Komitmen pada forum the 16th MM 6 WG RI-Singapura;
6. Komitmen pada forum SKB RI-Belarus;
7. Komitmen pada forum the 4th PPDT 1.5 RI-Jepang;
8. Komitmen pada forum the 4th SOM JCEC RI-Korea Selatan;
9. Komitmen pada forum the 3rd MM JCEC RI-Korea Selatan;
10. Komitmen pada forum SEOM RI-Australia;

c. **2 Komitmen implementasi yang terlaksana**
1. Komitmen implementasi dari kesepakatan RI-IPEF;
2. Komitmen implementasi dari kesepakatan RI-Korea.

2. Penguatan Realisasi Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara mitra Indonesia yang memiliki hubungan kerja sama ekonomi bilateral dengan Kemenko Perekonomian. Negara mintra Indonesia yang dimaksud antara lain: **Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Rusia, dan Belarus.**

Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh tahun tertentu dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi sub komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2026 yang memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Kemenko Perekonomian sebesar **USD 161 Miliar**.

Perhitungan target berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekspor di tahun 2026 dari nilai rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir (2021-2025). Data diolah bersumber dari Kementerian Perdagangan.

3. Penguatan Realisasi Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam

mata uang USD) dengan negara mitra Indonesia yang memiliki hubungan kerja sama ekonomi bilateral dengan Indonesia yang memiliki hubungan kerja sama dengan Kemenko Perekonomian. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain: Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Rusia, Belarus.

Realisasi nilai investasi bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan.

Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia tahun 2026 yang memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Kemenko Perekonomian sebesar **USD 35 Miliar**.

Perhitungan target berdasarkan total nilai rata-rata investasi dengan negara mitra utama Indonesia 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website BKPM/Kementerian Investas.

Dengan demikian, realisasi IKU 1.1 diperoleh dari penjumlah bobot atas capaian 3 (tiga) komponen diatas.

HASIL PENGUKURAN KINERJA

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target triwulan I sebesar 20% dengan komponen target pencapaian dengan 6 komitmen kerja sama ekonomi, nilai perdagangan, dan nilai investasi.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi dengan negara Mitra Utama Indonesia yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 10,57% atau mencapai 12,43% dari target Tahun 2026 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.1 Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia	Persen	85%	10,57% sampai dengan TW I	12,43%

Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi dengan negara Mitra Utama Indonesia yang mencapai target merupakan *cascading non direct* dari Jumlah Penyelesaian Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia (80%), Nilai Perdagangan

dengan Negara Mitra Indonesia (10%), dan Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%) yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 85%.

Sampai dengan laporan ini disusun, Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra sudah ada yang tercapai, namun untuk komponen Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia belum tersedia nilainya sehingga yang disampaikan masih bersifat proyeksi.

Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia yang terealisasi pada Triwulan I adalah:

1. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia – Inggris melalui Penandatanganan dokumen Arrangement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia to Establish an Economic Growth Partnership (EGP) pada tanggal 19 Januari 2026 oleh Menko Perekonomian bersama Secretary of State for Business and Trade (DBT) Kerajaan Inggris.

Berdasarkan data di atas serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun, proyeksi capaian komitmen kerja sama ekonomi dengan negara mitra pada Triwulan I Tahun 2026 diperkirakan berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta mitra kerja sama pada Triwulan I yang difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

Terkait capaian komponen nilai perdagangan dan investasi dengan negara mitra, hingga laporan ini disusun data realisasi Triwulan I Tahun 2026 masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya tersedia. Nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra pada periode Januari–Februari 2026 tercatat sebesar USD 26.453 juta, sehingga angka tersebut belum mencerminkan realisasi penuh Triwulan I dengan target sebesar USD 40.266 juta. Sementara itu, data realisasi investasi dari negara mitra untuk periode Triwulan I Tahun 2026 masih menunggu rilis resmi dari BKPM/Kementerian Investasi, sehingga capaian Triwulan I belum dapat dihitung secara final.

Dengan mempertimbangkan tren perdagangan yang tetap positif serta dukungan koordinasi lintas kementerian/lembaga, kinerja perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara mitra diperkirakan akan tetap terjaga pada Triwulan II Tahun 2026. Apabila pertumbuhan berjalan konsisten, Indonesia berpeluang mencapai target perdagangan sebesar USD 161.064 juta dan target investasi sebesar USD 35.318 juta pada akhir Tahun 2026.

<u>PELAKSANAAN RENCANA AKSI TW I</u>

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia

No	Renaksi TW 1	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia – Inggris (Penandatanganan RI-Inggris Economic Growth Partnership Agreement)	Terlaksana	• Di sela kunjungan kerja mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Inggris, Menko Perekonomian bertemu dengan Secretary of State for Business and Trade Kerajaan Inggris Peter Kyle serta menandatangani kerja sama *Economic Growth Partnership (EGP)* di London pada 19 Januari 2026. • Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia–Inggris dan mendukung implementasi *Accord for a New Indonesia–United Kingdom Strategic Partnership* yang diluncurkan oleh kedua kepala pemerintahan pada tanggal 20 Januari 2026 di London.
2.	Komitmen pada Forum WGTII RI – Rusia (Protocol WGTII RI-Rusia)	Terlaksana dengan perubahan	Pertemuan WGTII ke-7 RI-Rusia dilaksanakan pada tanggal 8-9 April 2026 pada TW II 2026. Sehingga Pelaksanaan Penandatanganan Protokol WGTII juga bergeser ke TW II, dengan pelaksanaan persiapan telah dilaksanakan sejak TW I.
3.	Komitmen Implementasi Kesepakatan RI -IPEF (Agreed Minutes Supply Chain LRAB Meeting)	Terlaksana dengan Perubahan	Pertemuan LRAB Subcommitte Meeting dibawah kerangka IPEF Pilar II baru terlaksana pada tanggal 10 April 2026 sehingga pelaksanaan implementasi kesepakatan RI-IPEF LRAB Meeting terlaksana dengan pergeseran ke TW II dan persiapannya dilakukan sejak TW I.
4.	Menganalisa potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra	Terlaksana	Selama TW I Tahun 2026, Keasdepan KSE Bilateral telah melaksanakan kegiatan analisis potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra, meliputi Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Rusia, dan Belarus. Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui desk analysis, pemantauan perkembangan perdagangan, identifikasi komoditas unggulan ekspor, serta evaluasi peluang peningkatan akses pasar dan kerja sama perdagangan termasuk berkoordinasi dengan Kemneterian Perdagangan mengenai data-datanya. Hasil

				analisis tersebut digunakan sebagai bahan dukung dan masukan strategis bagi Bapak Deputi dan Bapak Menko Perekonomian dalam pelaksanaan berbagai pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra.
	5.	Pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral sektor perdagangan pada TW 4 2025	Terlaksana	Selama TW I Tahun 2026, Keasdepan KSE Bilateral telah melaksanakan pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral sektor perdagangan yang disepakati pada TW IV Tahun 2025. Kegiatan dilakukan melalui pemantauan tindak lanjut komitmen, koordinasi dengan K/L terkait, identifikasi perkembangan implementasi, serta inventarisasi kendala dan langkah percepatan penyelesaian komitmen dengan negara mitra. Hasil pengendalian tersebut menjadi bahan evaluasi serta masukan strategis bagi Bapak Deputi dan Bapak Menko Perekonomian dalam mendorong efektivitas pelaksanaan kerja sama bilateral sektor perdagangan.
	6.	Menganalisa potensi investasi dengan negara mitra	Terlaksana	Selama TW I Tahun 2026, Keasdepan KSE Bilateral telah melaksanakan analisis potensi investasi dengan negara mitra melalui pengumpulan data dan informasi investasi serta perkembangan kerja sama bilateral. Kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan Asdep Percepatan Investasi dan Hilirisasi serta BKPM/Kementerian Investasi untuk memperoleh data dan masukan terkait tren investasi dan sektor potensial. Hasil pengumpulan data tersebut digunakan sebagai bahan dukung bagi Bapak Deputi dan Bapak Menko Perekonomian dalam pertemuan bilateral dengan negara mitra.
	7.	Pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral sektor investasi pada TW 4 2025	Terlaksana	Selama TW I Tahun 2026, Keasdepan KSE Bilateral telah melaksanakan pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral sektor investasi yang disepakati pada TW IV Tahun 2025. Kegiatan dilakukan melalui pemantauan tindak lanjut komitmen, pengumpulan perkembangan implementasi, serta koordinasi dengan Asdep Percepatan Investasi dan Hilirisasi, BKPM/Kementerian Investasi, dan K/L terkait. Hasil pengendalian tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan dukungan bagi Bapak Deputi serta

			Bapak Menko Perekonomian dalam pertemuan bilateral dengan negara mitra.

Selain pelaksanaan renaksi TW 1 di atas, upaya lain yang dilakukan untuk pemenuhan capaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah melakukan serangkaian Rapat Koordinasi dengan KL terkait serta Pihak Inggris untuk membahas dokumen kerja sama dalam kerangka Economic Growth Partnership pada bulan Januari 2026.
- Telah melakukan rangkaian pertemuan kerja sama RI-Rusia diantaranya Pertemuan Bapak Deputi dengan Dubes Rusia pada tanggal 30 Januari 2026 serta penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan KL terkait untuk membahas dan mengidentifikasi isu-isu pending kerja sama RI-Rusia sebagai persiapan Penyelenggaran Pertemuan WGTII ke-7 RI-Rusia dan SKB ke-14 RI-Rusia pada tanggal 3 Maret 2026.
- Telah melakukan Rapat Koordinasi dengan KL terkait untuk membahas dan mengidentifikasi isu-isu pending kerja sama RI-Belarus sebagai persiapan Penyelenggaran SKB ke-8 RI-Belarus pada tanggal 4 Maret 2026. Penyelenggaraan SKB ini rencananya akan dilaksanakan pada TW II dipimpin bersama oleh Bapak Menko Perekonomian dan Deputi Perdana Menteri Belarus.
- Telah melakukan dan menyelenggaraan Rapat Koordinasi Evaluasi Program PROSPERA Phase 1 Tahun 2018-2026 dan Pemberlakuan Program PROSPERA Phase 2 Tahun 2026-2031 pada tanggal 25 Februari 2026, dalam rangka memperoleh masukan KL sebagai Penerima Manfaat Prospera atas keberlanjutan pemanfaatannya yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan penyusuna Action Plan dan Daftar Penerima Manfaat PROSPERA Phase 2.
- Telah melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi MoU on Economic Cooperation 2.0 pada tanggal 6 Maret 2026, sebagai dasar kerjas ama Joint Committe on Economic Cooperation (JCEC) Indonesia – Korea, dimana MoU ini diusulkan menjadi salah satu deliverables dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Korea Selatan pada awal April 2026.
- Telah melakukan koordinasi dengan pihak USINDO, EXBS, Kedubes AS, serta KL terkait sepanjang TW I dalam rangka mempersiapkan Indonesia menjadi Tuan Rumah Southeast Asian Forum on Export Control (SEAFEC) 2026 dalam kerangka kerja sama Strategic Trade Management (STM) dengan AS.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting dengan pihak Rusia serta melakukan pertemuan-pertemuan lainnya di dalam kantor ataupun menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 50.858.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan forum lainnya yang akan dilakukan pada TW II-IV.

1.2. Persentase	**LATAR BELAKANG**

Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I - EU CEPA)	Penyelesaian isu strategis perjanjian Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA) sebagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi, yang bertujuan menghapus tarif impor secara luas untuk produk Indonesia ke Eropa dan membuka pasar Eropa, serta membuka akses investasi bagi Eropa ke Indonesia. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisaskan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan European Union (EU) sebagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi. IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong hasil nyata berupa penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian Indonesia- European Union CEPA Target IKU ini adalah terealisasinya 5 (lima) upaya penyelesaian isu strategis pada kesepakatan perjanjian Indonesia- EU CEPA 2026, yaitu: 1. Pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis dalam Legal Scrubbing IEU-CEPA; 2. Penyelenggaraan Rakor antar K/L pembahasan penyelesaian isu strategis dalam proses legal scrubbing perjanjian Indonesia-EU CEPA; 3. Penyelenggaraan Bilateral Meeting dengan Uni Eropa; 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi antar K/L pembahasan persiapanan finalisasi penandatanganan perjanjain I-EU CEPA; 5. Penyelenggaraan dukungan substansi danlogistik pada Hari Penandatanganan Perjanjian Indonesia - EU CEPA. Target pada IKU ini diproyeksikan tercapai 100% pada akhir 2026. **<u>HASIL PENGUKURAN KINERJA</u>** Target kinerja 2026 pada IKU ini adalah sebesar 100% berdasarkan pada RKP 2026. Hingga Triwulan I Tahun 2026, IKU 1.2. Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I - EU CEPA) telah terealisasi 1 (satu) yaitu: “Terlaksananya identifikasi isu-isu strategis dalam Legal Scrubbing I-EU CEPA” Dengan terealisasinya 1 (satu) upaya ini membuat capaian kinerja pada TW 1 pada IKU ini adalah sebesar 20% dari 100% target 2026, dengan ringkasan sebagai berikut: | IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
---	---	---	---	---

1.2. Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Indonesia – EU CEPA	Persen	100%	1 (satu) kegiatan	20%

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW 1 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka diprediksi realisasi dan capaian kinerja pada TW 2 dan selanjutnya di 2026 khususnya pada IKU Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Indonesia – EU CEPA diproyeksikan akan berjalan dengan baik.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui rakor, serta pelaksanaan kinerja TW 1 yang baik. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

PELAKSANAAN RENAKSI TW 1

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Indonesia – EU CEPA

No	Renaksi TW 1	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis dalam Legal Scrubbing IEU-CEPA	Terlaksana	➔ Telah dilakukan pengumpulan dukungan untuk proses *legal scrubbing* yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan selaku *Chief Negotiator* IEU-CEPA dan Ketua Pelaksana. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyusunan dokumen catatan akuntabilitas serta terjemahan teks IEU-CEPA ke dalam Bahasa Indonesia oleh masing-masing ketua *working group* selama periode Januari 2026. ➔ Saat ini, proses *legal scrubbing* teks IEU-CEPA telah dimulai oleh tim hukum dari kedua pihak sejak November 2025, dengan target penyelesaian pada Mei 2026.

Selain pelaksanaan renaksi TW 1 di atas, upaya lain yang dilakukan untuk pemenuhan capaian target kinerja adalah sebagai berikut:

	• Telah melakukan Indonesia-EU High Level Study Visit dalam rangka memperkuat kerja sama halal dalam kerangka IEU-CEPA, yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada tanggal 9-13 Februari 2026 di Brussels, Frankfurt, dan Copenhagen. Kegiatan ini melibatkan pertemuan teknis mengenai kebijakan sertifikasi halal Indonesia di kawasan Uni Eropa. Pertemuan ini juga merupakan langkah tindak lanjut dalam kesepakatan komprehensif *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) **EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA** Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting, melakukan pertemuan-pertemuan lainnya di dalam kantor, serta pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan anggaran Kebudes EU sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 156.200.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan forum lainnya yang akan dilakukan pada TW II-IV.
1.3. Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat	**LATAR BELAKANG** Penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia – Amerika Serikat merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi, yang bertujuan meningkatkan impor secara luas untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat dan membuka pasar Amerika Serikat, serta membuka akses investasi bagi Amerika Serikat ke Indonesia. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisaskan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat sebagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi. IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong hasil nyata berupa penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia- Amerika Serikat. Target IKU ini adalah terealisasinya 8 (delapan) upaya penyelesaian isu strategis pada kesepakatan perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia Indonesia-Amerika Serikat tahun 2026 sebagai berikut: 1. Penyelesaian isu strategis pada *intersessional meeting* perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) secara virtual; 2. Penyelesaian isu strategis pada perundingan ke-6 perjanjian perdagangan resiprokal in person di Washington DC;

3. Penyelesaian isu strategis dan sensitif pada *Ministerial Meeting;*
4. Penyelesaian isu strategis pada pelaksanaan Indonesia-United States Leaders and Business Summit 2026;
5. Penyelesaian isu strategis dalam dokumen perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) Indonesia-AS;
6. Penyelesaian isu strategis pada *Consultation of Section 301 Investigation of the Trade Act of 1974*;
7. Penyelesaian isu strategis pada penyusunan amandemen perja njian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia-AS;
8. Penyelesaian isu strategis tindak lanjut amandemen perjanjian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia-AS.

Target pada IKU ini diproyeksikan tercapai 100% pada akhir 2026.

HASIL PENGUKURAN KINERJA

Target kinerja 2026 pada IKU ini adalah sebesar 100% berdasarkan pada RKP 2026. Hingga Triwulan I Tahun 2026, IKU 1.3. Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat telah terealisasi 5 (lima) yaitu:

1. Terselesaikannya isu strategis pada *intersessional meeting* perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) secara virtual;
2. Terselesaikannya isu strategis pada perundingan ke-6 perjanjian perdagangan resiprokal in person di Washington DC;
3. Terselesainya isu strategis dan sensitif pada *Ministerial Meeting;*
4. Terselesaikannya isu strategis pada pelaksanaan Indonesia-United States Leaders and Business Summit 2026;
5. Terselesaikannya isu strategis dalam dokumen perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) Indonesia-AS

Dengan terealisasinya 5 (lima) upaya ini membuat capaian kinerja pada TW 1 pada IKU ini adalah sebesar 62.5% dari 100% target 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.3. Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – AS	Persen	100%	5 (lima) kegiatan	62.5%

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW 1 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka diprediksi realisasi dan capaian kinerja pada TW 2 dan selanjutnya di 2026 khususnya pada IKU Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – AS diproyeksikan akan berjalan dengan baik.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui rakor, serta pelaksanaan kinerja TW 1 yang baik. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

PELAKSANAAN RENAKSI TW 1

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3. Persentase Penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – AS

No	Renaksi TW 1	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyelesaian isu strategis pada Intersessional Meeting Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART dan CSC) secara virtual	Terlaksana	Diselenggarakan Pertemuan Intersesi dengan USTR membahas Teks ART RI-AS terkait Services and Investment dan Customs Trade Facility pada tanggal 8-9 Januari 2026
2.	Penyelesaian isu strategis pada Perundingan putaran ke-6 Perjanjian Perdagangan Resiprokal in person di Washington DC	Terlaksana	Telah dilaksanakan Perundingan Putaran ke-6 Perjanjian Perdagangan Resiprokal di Washington DC pada tanggal 12 s.d 23 Januari 2026.
3.	Penyelesaian isu strategis dan sensitif pada Ministerial Meeting	Telaksana	Telah dilaksanakan pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Deputy USTR pada tanggal 20 Januari 2026 untuk membahas pending-pensing isu yang sensitif dalam perundingan ART RI-AS
4.	Penyelesaian isu strategis pada pelaksanaan Indonesia - United States Leaders and Business Summit 2026	Terlaksana	➔ Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Acara Forum Bisnis Perdagangan dan Investasi Indonesia-AS pada tanggal 28 Januari secara virtual dengan pihak USINDO dan USABC serta pertemuan persiapan di Washington DC pada tanggal 17 Februari 2026 sebagai Persiapan pelaksanaan Indonesia-United States Leaders and Business Summit 2026, serta telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penandatanganan MoU BtoB pada Business Summit pada tanggal 17 Febuari 2026 yang dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian. ➔ Pertemuan Indonesia-

			United States Leaders and Business Summit 2026 dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2026.
5.	Penyelesaian isu strategis dalam dokumen perjanjian perdagangan resiprokal (ART dan CSC) Indonesia dan Amerika Serikat	Terlaksana	Telah dilaksanakan pertemuan pembahasan Legal Scrubing Teks Perjanjian ART RI-AS anatara Pemri dengan USTR pada tanggal 13-14 Februari 2026 secara virtual dalam rangka menyelesaian seluruh isu dalam dokumen perjanjian ART RI-AS.

Selain pelaksanaan renaksi TW 1 di atas, upaya lain yang dilakukan untuk pemenuhan capaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah melakukan Pertemuan Menko Perekonomian dengan Under Secretary for Trade and Foreign Agricultural Affairs pada tanggal 4 Februari 2026 dengan salah satu pembahasannya terkait komitmen penyelesaian isu perdagangan khususnya sektor pertanian agar perjanjian ART dapat di ttd dan diimplementasikan
- Telah melakukan rangkaian persiapan untuk membahas persiapan penandatangaan dokumen ART RI-AS dengan Pemri maupun dengan USTR serta persiapan penandatanganan MoU BtoB dalam Pertemuan Indonesia - United States Leaders and Business Summit di bulan Januari s.d Februari 2026
- Telah melakukan pertemuan konferensi pers kepada Media yang dilakukan oleh Bapak Menko Perkeonomian mengenai hasil penandatanganan Kesepakatan Perjanjian ART RI-AS pada tanggal 19 Februari 2026 di Washington DC
- Telah melakukan penyusunan tanggapan atas isu-sisu sensitif dalam Kesepakatan Perjanjian ART RI-AS pada tanggal 20 Februari
- Telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Setkab terkait Tarif Resiprokal pada tanggal 25 Februari 2026

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting dengan pihak USTR maupun melakukan pertemuan lainnya di dalam kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 101.858.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan forum lainnya yang akan dilakukan pada TW II-IV.

2 Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia	**<u>LATAR BELAKANG</u>** Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) tahapan yaitu: 1. Perencanaan Kebijakan; 2. Implementasi Kebijakan; 3. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan; 4. Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian (SKP) kebijakan terkait kerja sama ekonomi bilateral yang berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup kerja Keasdepan KSE Bilateral, yaitu seperti: SKP dalam rangka penyelesaian kesepakatan dalam perundingan perjanjian perdagangan dan investasi, PTA/FTA/CEPA, maupun kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral. Selain itu SKP dalam rangka penyelesaian kesepakatan yang terdapat dalam forum kerja sama ekonomi bilateral yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian. SKP dalam rangka untuk implementasi kerja sama ekonomi bilateral di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian. Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian 4 (empat) tahapan siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut: 1. 20% Perencanaan Kebijakan; 2. 25% Implementasi Kebijakan; 3. 27,5% Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan; 4. 27,5% Transparansi dan Partisipasi Publik. Adapun target dokumen pada setiap tahapannya adalah sejumlah 22 penyelesaian komitmen kerja sama dan isu strategis perjanjian, sebagai berikut: 1. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Inggris; 2. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Korea Selatan; 3. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-RRT; 4. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Australia; 5. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Amerika Serikat: 6. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-EAEU; 7. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Kanada; 8. Penyelesaian Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Jepang; 9. Penyelesaian Isu Strategis pada perjanjian I-EU CEPA 10. Penyelesaian Isu Strategis pada perjanjian perdagangan resiprokal I-Amerika Serikat

11. Penyelesaian Komitmen pada forum WGTII RI-Rusia;
12. Penyelesaian Komitmen pada forum SKB RI-Rusia;
13. Penyelesaian Komitmen pada forum Board Meeting Prospera Phase II;
14. Penyelesaian Komitmen pada forum the 13th SOM 6 WG RI-Singapura;
15. Penyelesaian Komitmen pada forum the 16th MM 6 WG RI-Singapura;
16. Penyelesaian Komitmen pada forum the 4th PPDT 1.5 RI-Jepang;
17. Penyelesaian Komitmen pada forum the 4th SOM JCEC RI-Korea Selatan;
18. Penyelesaian Komitmen pada forum the 3rd MM JCEC RI-Korea Selatan;
19. Penyelesaian Komitmen pada forum SKB RI-Belarus;
20. Penyelesaian Komitmen pada forum SEOM RI-Australia;
21. Penyelesaian Komitmen implementasi dari kesepakatan I-K CEPA;
22. Penyelesaian Komitmen implementasi dari kesepakatan RI-IPEF.

Target pada IKU ini diproyeksikan tercapai 85% pada akhir 2026.

HASIL PENGUKURAN KINERJA

Target kinerja 2026 pada IKU ini adalah sebesar 85% berdasarkan pada RKP 2026. Hingga Triwulan I Tahun 2026, IKU 2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia telah terealisasi tahapan-tahapan kinerja pada 4 (empat) penyelesaian komitmen yaitu:

1. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian komitmen kerja sama ekonomi bilateral Indonesia – Inggris pada Economic Growth Partnership (EGP) Agreement RI-Inggris
2. Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS
3. Melakukan Rakor Persiapan terkait Penyelenggaran Pertemuan WGTII ke-7 RI – Rusia
4. Melakukan Rakor Persiapan terkait implementasi IPEF on Supply Chain LRAB Meeting

Dengan terealisasinya tahapan-tahapan dari 4 (empat) penyelesaian komitmen ini membuat capaian kinerja pada TW 1 pada IKU ini adalah sebesar 13% dari 100% target 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

IKU	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia	Persen	85%	11%	13%

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan hingga laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja Triwulan I (TW 1) menunjukkan bahwa sebanyak

2 komitmen telah mencapai 4 tahapan, serta 2 komitmen lainnya telah mencapai tahapan ke-2. Dengan demikian, masih terdapat target yang belum tercapai. Namun, target tersebut telah direncanakan untuk dilaksanakan pada Triwulan II (TW 2). Oleh karena itu, realisasi dan capaian kinerja pada TW 2 dan selanjutnya pada tahun 2026, khususnya pada IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum, serta Implementasi Kebijakan dalam Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia, diproyeksikan akan berjalan dengan baik.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui rakor, serta pelaksanaan kinerja TW 1 yang baik. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

PELAKSANAAN RENAKSI TW 1

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia

No	Renaksi TW 1	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian komitmen kerja sama ekonomi bilateral Indonesia – Inggris pada Economic Growth Partnership (EGP) Agreement RI-Inggris	Terlaksana	• Telah dilaksanakan serangkaian koordinasi dan pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris untuk membahas serta memfinalisasi dokumen Arrangement on Economic Growth Partnership pada tanggal 7 dan 9 Januari 2026 secara virtual. • Selanjutnya, telah dilakukan penandatanganan Dokumen Arrangement EGP oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Secretary of State for Business and Trade (DBT) Kerajaan Inggris pada tanggal 19 Januari 2026, yang menjadi salah satu deliverables dalam Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Inggris. • Lebih lanjut, telah dilaksanakan pertemuan lanjutan dengan pihak Inggris pada tanggal 24 Februari 2026 untuk membahas tindak lanjut implementasi EGP RI–Inggris, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan EGP Implementation Plan untuk tahun 2026. • Terkait kerja sama Indonesia dengan Inggris dalam kerangka EGP RI–Inggris, dokumen kerja sama tersebut telah disusun dan dipublikasikan pada laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

	2.	Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait penyelesaian Isu Strategis pada Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS	Terlaksana	• Telah dilaksanakan serangkaian pertemuan dan perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka penyelesaian isu strategis pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART dan CSC), termasuk Pertemuan Intersesi secara virtual bersama USTR pada tanggal 8–9 Januari 2026 yang membahas teks ART RI–AS terkait Services and Investment serta Customs Trade Facility; Perundingan Putaran ke-6 Perjanjian Perdagangan Resiprokal secara langsung di Washington DC pada tanggal 12–23 Januari 2026; serta pertemuan tingkat menteri antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Deputy USTR pada tanggal 20 Januari 2026 guna membahas isu-isu sensitif yang masih tertunda dalam perundingan ART RI–AS. • Lebih lanjut, telah dilakukan pertemuan pembahasan legal scrubbing teks Perjanjian ART RI–AS antara Pemerintah Indonesia dan USTR pada tanggal 13–14 Februari 2026 secara virtual dalam rangka menyelesaikan seluruh isu dalam dokumen perjanjian. • Penandatanganan kesepakatan ART RI-AS diawali dengan Penandatanganan dokumen bersama Kerja Sama RI-AS oleh Kedua Kepala negara pada tanggal 19 Januari 2026, di sela-sela agenda BoP terkait komitmen untuk memasuki babak baru kemitraan starregis kedua negara. Sebagai tindak lanjut, Menko Perekonomian bersama USTR menandatanganani dokumen teknis perjanjian ART RI-AS pada tanggal 19 Januari 2026 di Washington DC • Lebih lanjut, paska penandatangan, telah diselenggarakan Konferensi Pers untuk menyampaikan secara resmi kepada publik hasil-hasil utama kesepakatan *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat oleh Bapak Menko Perekonomian. • Selanjutnya, telah dilakukan penyusunan tanggapan atas isu-isu sensitif dalam kesepakatan Perjanjian ART RI–AS pada tanggal 20 Februari 2026, serta rapat koordinasi dengan Sekretariat Kabinet terkait tarif resiprokal pada tanggal 25 Februari 2026.
	3.	Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan	Terlaksana dengan	Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pertemuan WGTII ke-7 RI-Rusia pada

	penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait Forum WGTII RI – Rusia (Protocol WGTII RI-Rusia)	Perubahan	tanggal 3 Maret 2026 bersama seluruh KL Terkait untuk membahas pending isu kerja sama RI-Rusia serta telah disirkulasikan permohonan masukan atas dokumen Protokol kesepakatan-kesepakatan WGTII ke-7 RI-Rusia selama bulan Maret 2026. Pelaksanaan Pertemuan WGTII ke-7 beserta Penandatanganan Protokol dilaksanakan dan bergeser pada TW II pada tanggal 8-9 April 2026,
4.	Melakukan Rakor Persiapan, melaksanakan penandatangan perjanjian, mengevaluasi, serta menyusun konsep siaran pers terkait implementasi IPEF on Supply Chain LRAB Meeting	Terlaksana dengan Perubahan	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi bersama KL terkait sebagai persiapan Pertemuan IPEF LRAB pada tanggal 19 Februari 2026. Namun terdapat pergeseran Pertemuan IPEF LRAB menjadi TWII pada tanggal 10 April 2026.

Selain pelaksanaan renaksi TW 1 di atas, upaya lain yang dilakukan untuk pemenuhan capaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah melakukan Rapat Koordinasi dalam Rangka Persiapan Kunjungan Studi Mengenai Pasar Tunggal Uni Eropa dan Kebijakan Halal pada tanggal 3 Februari 2026
- Telah menyelenggarakan FGD Rancangan Hukum dan Regulasi Strategic Trade Management (STM) di Indonesia pada tanggal 5 Februari 2026
- Telah melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Program PROSPERA Phase 1 Tahun 2018-2026 dan Pemberlakuan Program PROSPERA Phase 2 Tahun 2026-2031
- Telah melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan SKB ke-14 RI-Rusia pada tanggal 3 Maret 2026
- Telah melakukan Rapat Koordinasi dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan SKB ke-8 RI-Belarus pada tanggal 4 Maret 2026
- Telah dilakukan Pertemuan Bapak Deputi dengan Dubes Rusia pada tanggal 31 Januari 2026 dalam rangka persiapan Penyelenggaraan WGTII ke-7 RI-Rusia dan SKB ke-14 RI-Rusia
- Telah dilakukan Pertemuan Menko Perekonomian dengan Dubes Belarus pada tanggal 5 Maret 2026 dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan SKB ke-8 RI-Belarus
- Telah dilakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi MoU on Economic Cooperation 2.0 pada tanggal 6 Maret 2026

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting dengan pihak negara Mitra serta melakukan pertemuan-pertemuan lainnya di dalam kantor, serta melakukan penyelenggaran dengan menggunakan pembiayaan luar tanpa APBN sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 50.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan forum lainnya yang akan dilakukan pada TW II-IV.

3	**Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berkualitas**

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral

LATAR BELAKANG

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Mengukur tingkat Kepuasan layanan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam upaya penyelesaian komitmen Kerjasama dan penyelesaian isu strategis perjanjian dengan negara mitra oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Target pada IKU ini diproyeksikan tercapai 3 dari 4 pada akhir 2026.

HASIL PENGUKURAN KINERJA

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4 (Baik) atas Indeks. Hingga Triwulan I Tahun 2026, Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 3 dari target Tahun 2026 sebesar Indeks 3 dengan ringkasan sebagai berikut:

IKU	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Indeks	3 dari 4	3	25%

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW 1 telah tercapai

sesuai dengan target yang ditetapkan, maka diprediksi realisasi dan capaian kinerja pada TW 2 dan selanjutnya di 2026 khususnya pada IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral diproyeksikan akan berjalan dengan baik.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui rakor, serta pelaksanaan kinerja TW 1 yang baik. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

PELAKSANAAN RENAKSI TW 1

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral

No	Renaksi TW 1	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan layanan KSP di bidang kerja sama ekonomi bilateral TW 1	Terlaksana	Dalam rangka memperoleh penilaian atas pelaksanaan koordinasi pada TW I, telah dilakukan penyusunan kuesioner survei serta penyebaran tautan survei kepada para counterpart K/L Kedubes dan Mitra terkait lainnya.

4 Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

LATAR BELAKANG

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi RB di lingkungan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral. Adapun komponen penilaian RB di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi RB General dan/ atau RB Tematik di lingkungan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau RB Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi RB di lingkungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dihitung berdasarkan

seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat pelaksanaan RB General di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral. Adapun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral 2026 adalah sebagai berikut:

Inisiatif Strategis	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Optimalisasi Implementasi RB General di Asdep KSE Bilateral	1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU 2. Penyusunan Lapkin TW 1 3. Optimalisasi SRIKANDRI TW 1 4. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	5. Penyusunan lapkin TW 2 6. Optimalisasi SRIKANDRI TW 2 7. Penyusunan Revisi Renja 2026 8. Penyusunan Renja 2027 9. Penyusunan TOR RAB	10. Penyusunan Lapkin TW 3 11. Optimalisasi SRIKANDRI TW 3 12. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP 13. Penyusunan matriks Manajemen Risiko	14. Penyusunan Lapkin TW 4 15. Optimalisasi SRIKANDRI TW 4

Target pada IKU ini diproyeksikan tercapai 85% pada akhir 2026.

HASIL PENGUKURAN KINERJA

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85% atas Indeks. Hingga Triwulan I Tahun 2026, Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 21% dari target 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

IKU	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Persen	92%	20%	21,7%

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW 1 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka diprediksi realisasi dan capaian kinerja pada TW 2 dan selanjutnya di 2026 khususnya pada IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral diproyeksikan akan berjalan dengan baik.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berjalan sesuai rencana, didukung dengan koordinasi internal yang efektif, pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta komitmen seluruh unit kerja dalam memenuhi target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada triwulan

berikutnya diharapkan tetap berjalan sesuai target.
.

PELAKSANAAN RENAKSI TW 1

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

No	Renaksi TW 1	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU	Terlaksana	Penyusunan dan Penetapan Kinerja, serta Rencana Aksi Manual IKU Asisten Deputi Kerja Sama Bilateral telah dilaksanakan pada TW I
2.	Penyusunan Lapkin TW 1	Terlaksana	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja TW I dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kinerja
3.	Optimalisasi SRIKANDRI TW 1	Terlaksana	Dalam pelaksanaan persuratan dan dokumentasi Keasdepan Asisten Deputi KSE Bilateral telah menggunakan dan memanfaatkan Srikandi secara optimal
4.	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	Terlaksana dengan perubahan	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja belum selesai ditetapkan dan masih menunggu reviu Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian

Selain pelaksanaan renaksi TW 1 di atas, upaya lain yang dilakukan untuk pemenuhan capaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah menyusun Monitoring dan Evaluasi untuk Capaian Kegiatan dan Anggaran Asdep Bilateral melalui E-Monev Bappenas setiap bulannya.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting, menfurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas yang telah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan SRIKANDI, dan memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalnana dinas.

B. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target IKU Keasdepan KSE Bilateral

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target IKU Asdep KSE Bilateral yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa

kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. **Keterbatasan anggaran**, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada Triwulan I, yang menyebabkan sejumlah pertemuan dengan negara mitra harus diselenggarakan secara virtual dan hybrid, ataupun partisipasi aktif dalam sebuah forum harus dilaksanakan secara virtual.
2. **Keterbatasan sumber daya manusia**, khususnya di unit kerja KSE Bilateral, yang tidak sebanding dengan beban kerja yang cukup padat dan kompleks.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. **Optimalisasi pelaksanaan pertemuan secara hybrid** dengan negara mitra, termasuk pemanfaatan fasilitas ruang kantor yang tersedia, serta menjajaki dukungan sponsor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.
2. **Peningkatan efisiensi pembagian tugas**, dengan fokus pada kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis, mengingat keterbatasan jumlah personel yang tersedia.

Jakarta, 10 April 2026
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Irwan Sinaga
NIP 19700509 199503 1 001